

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai “Analisa Penerapan Sistem E-Pangkat Dalam Prosedur kenaikan Pangkat ASN Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penilaian kinerja memiliki peranan penting dalam proses menentukan kenaikan pangkat pegawai. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 mengatur tentang Angka Kredit (AK) yang dibutuhkan untuk kenaikan pangkat dan Jabatan Fungsional (JF). Persyaratan Angka Kredit (AK) termasuk penilaian kinerja, pengembangan diri, dan pendidikan serta pelatihan. Penilaian kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja (PPK) yang merupakan atasan langsung yang hasilnya dikonversi menjadi nilai angka dan predikat (sangat baik, baik, cukup, kurang dan angat kurang). Tujuan adanya peraturan ini agar dapat menjadikan proses penilaian kinerja dan kenaikan pangkat lebih transparan, objektif dan adil serta dapat mendorong peningkatan kinerja dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS)
2. Periodisasi: Berdasarkan Surat Edaran yang di keluarkan Nomor 16 Tahun 2023, tentang proses kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya berlangsung dua kali dalam setahun, akan di ubah mulai Januari 2024. Badan Kepegawaian Negara menetapkan perubahan ini melalui Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023, untuk meningkatkan periodisasi

kenaikan pangkat menjadi enam kali dalam setahun. Jadwal baru yang ditetapkan yaitu pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember setiap tahunnya. Namun perubahan ini tidak berlaku untuk kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian.

3. Proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui sistem e-pangkat: dimulai dengan persiapan, dimana Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengajukan usulan kenaikan pangkat secara online melalui aplikasi e-pangkat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan verifikasi dan validasi data usulan tersebut sebelum pejabat yang berwenang menetapkan keputusan kenaikan pangkat. Pengusulan kenaikan pangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan mengisi formulir usulan secara online dan melampirkan dokumen persyaratan yang telah dipindai dan proses penerbitan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui aplikasi e-pangkat.
4. Sistem e-pangkat mulai diterapkan pada juli 2018 di kantor Badan Kepegawaian Daerah Sumatera Barat, pada kantor ini memakai sistem e-pangkat untuk proses usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil secara elektronik. Sistem ini terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), sehingga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat tidak perlu mengantar langsung syarat usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ke Kementerian Dalam Negeri, melainkan cukup dengan melalui aplikasi e-pangkat.
5. Penggunaan sistem e-pangkat: yaitu dengan cara login pada web sistem e-pangkat yang diakses di browser seperti Google Chrome, Internet, Explore,

Mozilla Firefox, dan lain sebagainya. untuk mengakses sistem e-pangkat hanya dapat diakses oleh administrator yang memproses prosedur usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sistem e-pangkat tidak diakses untuk kalangan umum, dengan begitu data pada sistem e-pangkat sangat terjaga keamanannya.

6. Data yang dikelola pada sistem e-pangkat ini berupa berkas usulan kenaikan pangkat yang sudah di lengkapi oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, semua berkas usulan akan diinput dalam bentuk file pdf pada halaman penamaan dokumen yang akan di unggah saat melakukan usulan kenaikan pangkat. Dengan adanya sistem e-pangkat ini pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat mengatur jadwal Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat berdasarkan jenis kenaikan pangkat yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil. Inilah kemudahan yang diberikan oleh sistem e-pangkat karena Pegawai Negeri Sipil tidak perlu mengantarkann syarat usulan kenaikan pangkat ke kantor Badan Kepegawaian Daerah.
7. Kendala penggunaan sistem e-pangkat pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu: kurangnya pemahaman pegawai terhadap detail prosedur dan tahapan, serta kelengkapan administratif dengan sistem kenaikan pangkat e-pangkat, adapun kendala lainnya seperti lambatnya proses pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dan sistem eror.
8. Solusi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu: dengan cara meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar

instansi terkait, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat menjadi langkah penting yang harus diambil. Selain itu, peningkatan kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat juga perlu dilakukan agar seluruh proses dapat dikelola dengan lebih efisien dan efektif.

Penerapan sistem e-pangkat di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat telah memberikan banyak keuntungan, seperti peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam prosedur kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS). Meski begitu, masih ada beberapa kendala teknis dan non-teknis yang perlu diatasi. Dengan meningkatkan infrastruktur, memberikan pelatihan, mengembangkan sistem, dan penerapan sistem e-pangkat dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Ini tidak hanya mempermudah proses kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik secara keseluruhan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dan penelitian yang dilaksanakan adapun beberapa saran yang menjadi pertimbangan untuk meningkatkan penerapan dan penggunaan sistem e-pangkat dalam prosedur kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

1. Untuk mengatasi kendala dari sistem e-pangkat salah satunya akses internet yang eror dan lelet sehingga menghambat penggunaan sistem e-pangkat. Disarankan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk berkoordinasi pada instansi pemerintah lainnya untuk meningkatkan kualitas jaringan internet agar sistem e-pangkat dapat berjalan dengan lancar

2. Untuk mengatasi kendala sistem e-pangkat , menjaga keamanan sistem e-pangkat, dan mengoptimalkan performa sistem e-pangkat. Disarankan untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan update sistem secara berkala untuk terhindar dari ancaman seperti virus, sehingga tidak menghambat jalan kerjanya pegawai melalui sistem e-pangkat, serta melakukan evaluasi dan monitoring berkala terhadap kinerja sistem e-pangkat dan kepuasan pengguna untuk memastikan bahwa sistem tersebut terus relevan dan efektif dalam memenuhi kebutuhan pegawai.

